



► KAMPANYE PILKADA 2024

4.823 APK Langgar Aturan Pemasangan

KOTAGEDE—Menjelang berakhirnya masa kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Kota Jogja kembali mengirimkan saran perbaikan kepada pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja, khususnya dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Berdasarkan pendataan, sebanyak 4.823 APK harus diperbaiki karena melanggar ketentuan.

*Luqas Subarkah
luqas@harianjogja.com*

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa, menjelaskan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Jogja, saran perbaikan diberikan untuk 4.823 APK yang melanggar ketentuan pemasangan. "APK yang melanggar tersebut tersebar di 14

- Berdasarkan pengawasan, saran perbaikan diberikan untuk 4.823 APK yang melanggar aturan pemasangan.
- Jika tidak ada perbaikan, Bawaslu menjadikannya sebagai temuan dugaan pelanggaran.

Kemantren se-Kota Jogja," ujarnya, Kamis (14/11).

Rincian jumlah tersebut yakni 331 APK di Danurejan; 108 APK di Gedongtengen; 487 APK di Gondokusuman; 376 APK di Gondomanan; 315 APK di Jetis; 361 APK di Kotagede; 204 APK di Kraton; 257 APK di Mantrijeron; 605 APK di Mergangsan; 655 APK di Umbulharjo; 291 APK di Pakualaman; 344 APK di Tegalrejo; 134 APK di Wirobrajan; dan 335 APK di Ngampilan.

Saran perbaikan sudah dikirimkan kepada seluruh paslon pada Selasa (12/11) malam. Saran perbaikan yang diberikan terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur pemasangan

yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Jogja dan Keputusan KPU Kota Jogja. "Kami memberikan saran kepada paslon dan tim kampanye untuk memperbaiki dan menyesuaikan aturan pemasangan APK," kata Ketua Bawaslu Kota Jogja, Andie Kartala.

Bawaslu memberikan waktu tiga hari kepada paslon untuk memperbaiki pemasangan APK dan memindahkannya ke lokasi yang tidak melanggar regulasi. Jika tidak ada perbaikan, maka Bawaslu akan menjadikannya sebagai temuan dugaan pelanggaran. "Kami segera memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Jogja untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia.

Evaluasi Debat

Terkait dengan pelaksanaan debat paslon, KPU Kota Jogja memiliki sejumlah catatan. Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harysa Aryosamodro, menjelaskan masukan pertama bernada

positif yakni terkait dengan tema tata kelola kota yang inklusif. Tema ini dipandang sesuai dengan kebutuhan Kota Jogja sebagai kota wisata dan kota pendidikan. "Karena Kota Jogja merupakan kota wisata, maka tema ini menjadi spirit yang mendapat dukungan dari NGO, difabel," katanya, Rabu (13/11).

Soal debat, KPU juga menerima masukan dari Bawaslu Kota Jogja, yakni agar tim paslon bisa lebih tertib. "Dalam debat sebelumnya, ada tim pemenang paslon yang membawa dan membunyikan *othok-othok*, ini menjadi bahan evaluasi untuk kami koordinasikan dengan paslon dan pihak lainnya agar lebih tertib," katanya.

Masukan lainnya berasal dari paslon yang meminta agar debat juga disiarkan di stasiun televisi lokal. Sebelumnya, KPU Kota Jogja menyiarkan debat melalui *Youtube* KPU Kota Jogja dan *E Channel* bekerja sama dengan *Metro TV*, *YK TV* yang bisa diakses di *Youtube*.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005